

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah dengan memanfaatkan secara bijaksana sumber daya manusia, sumber daya alam dan potensi yang dimiliki.

Pada dasarnya hakekat pembangunan ekonomi daerah adalah merupakan serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pembagian pendapatan masyarakat. Kinerja pembangunan ekonomi mempunyai kedudukan yang amat penting, karena keberhasilan di bidang ekonomi dapat menyediakan sumber daya yang lebih luas bagi pembangunan di bidang lainnya. Namun sebaliknya, untuk melakukan pembangunan ekonomi diperlukan landasan yang kuat, yaitu pengambilan kebijakan yang tepat, akurat dan terarah, supaya hasil yang dicapai akan benar-benar sesuai dengan yang direncanakan.

Salah satu indikator meningkatnya kinerja ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai alat ukur bagi keberhasilan pembangunan daerah, dimana peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut harus memperhatikan beberapa hal antara lain : kondisi ekonomi masyarakat yang ada, potensi sumber daya alam dan manusia serta infrastruktur yang tersedia. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut selanjutnya disusun perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam membuat perencanaan telah mempertimbangkan beberapa faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi terhadap pembangunan. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada. Analisa terhadap unsur-unsur tersebut sebagai dasar untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang efektif.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah daerah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada *input*, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencari kinerja tertentu berupa baik *output* maupun *outcome*.

Sehubungan dengan itu, maka sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance*

dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *Cost efficiency dan cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dan teknis penyusunannya diterapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Keinerja Instansi Pemerintah, yang diperbaiki dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua

aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan. Keputusan Kepala LAN tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan membangun secara baik dan benar (*Good Governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadi instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

#### **A.1. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas bidang urusan Perekonomian.

Agar dalam pelaksanaan bidang urusan Perekonomian sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Magetan. Faktor-faktor memanfaatkan kekuatan (*Strength*) dan mengatasi (*weakness*) dan

dari faktor internal agar dapat memanfaatkan peluang (*opportunity*) dan dapat mengatasi ancaman (*Threat*) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Bagian Administrasi perekonomian Setda Magetan dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi dibidang urusan Perekonomian mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Magetan ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Magetan Tahun Anggaran 2019.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Bagian Administrasi perekonomian Setda Magetan selama Tahun Anggaran 2019;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Magetan pada Tahun 2019, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Magetan dimasa yang akan datang;
- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda Magetan sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

## **A.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Administrasi Perekonomian Tahun Anggaran 2019 adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
- r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

- s. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- t. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan ;
- v. Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Magetan dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan mempunyai tugas : “Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan, perumusan pedoman dan dan menyusun bahan koordinasi di bidang BUMD, perbankan, penyertaan modal, investasi, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan, jasa, koperasi dan Usaha Kecil Menengah” .

Untuk menjalankan tugas tersebut, Bagian Administrasi Perekonomian Setda Magetan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan pengolahan bahan regulasi, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan monitoring evaluasi bidang BUMD, perbankan, penyertaan modal dan investasi.
- b. Penyusunan dan pengolahan bahan regulasi, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan monitoring evaluasi bidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.

- c. Penyiapan dan Pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Penyusunan dan pengolahan bahan regulasi, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan monitoring evaluasi bidang pariwisata, industri, perdagangan, jasa, koperasi dan UKM dan pengendalian inflasi daerah.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Bagian Administrasi Perekonomian terdiri dari 3 (sub) Sub Bagian sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Bina Usaha Daerah dan Investasi.
- b. Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian.
- c. Sub Bagian Bina Produksi.

Yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

*a. Sub Bagian Bina Usaha Daerah dan Investasi mempunyai tugas:*

1. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan kajian pemerintah daerah bidang BUMD, perbankan, penyertaan modal dan investasi.
2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pembinaan bidang BUMD, perbankan, penyertaan modal dan investasi.
3. Menyusun regulasi terkait BUMD, perbankan, penyertaan modal dan investasi.
4. Mempersiapkan rapat koordinasi dengan pengelola BUMD dan perbankan dalam rangka peningkatan kinerja.
5. Melaksanakan urusan administrasi surat keluar /masuk dan penataan kearsipan di lingkup Bagian Administrasi Perekonomian.
6. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian

*b. Sub Bagian Bina sarana Perekonomian mempunyai tugas :*

1. Mengolah dan mengumpulkan data sebagai bahan kajian pemerintah di bidang pariwisata, industri, perdagangan, jasa, koperasi dan usaha kecil menengah.

2. Menghimpun laporan bahan dan data kebutuhan pokok masyarakat, bekerjasama dengan instansi terkait sebagai bahan evaluasi.
3. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Dana Bagi Hasil cukai Hasil Tembakau
4. Melaksanakan dan mengevaluasi penggunaan Dana bagi Hasil Cukai hasil Tembakau dengan cara bekerjasama dengan instansi terkait agar peruntukannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lintas sektor dalam pelaksanaan program Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT).
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama instansi terkait
7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program Pengendalian Inflasi Daerah
8. Melaksanakan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkup Bagian Administrasi Perekonomian
9. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian

*10. Sub Bagian Bina Produksi mempunyai tugas :*

1. Mengolah dan mengumpulkan data di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan melalui koordinasi dengan instansi terkait sebagai bahan penentuan kebijakan
2. Menyiapkan program pembinaan dan petunjuk teknis terhadap usaha peningkatan produksi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.
3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna menyamakan persepsi dan langkah pelaksanaan kegiatan dibidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap distribusi Beras untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
5. Melaksanakan monitoring evaluasi dan penagiahn terhadap kredit Ekonomi Rakyat (KEK) Intan Pesada.
6. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan aset di lingkup Bagian Administrasi Perekonomian.

7. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian

**Eselonisasi jabatan pada Bagian Administrasi Perekonomian :**

Bagian Administrasi Perekonomian dikepalai oleh Kepala Bagian mempunyai Eselon III.

Dan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai Eselon IV dan staf.

**Sumber daya Manusia ( SDM ) pada Bagian Administrasi Perekonomian :**

- Pada Bagian Administrasi Perekonomian terdapat 11 pegawai yang terdiri dari :
  - a. Kepala Bagian : 1 Orang.
  - b. Kasubbag : 3 Orang
  - c. Staf : 7 Orang
- **Ditinjau dari pendidikan :**
  - Pendidikan S2 : 1 Orang
  - Pendidikan S1 : 9 Orang
  - Pendidikan SMA : 1 Orang
- **Pangkat dan Golongan :**
  - Golongan III : 10 Orang
- **Pejabat Struktural dan Fungsional :**
  - Pejabat Struktural : 4 Orang
  - Pejabat Fungsional : - Orang

**C. Pola Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 dan Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Kinerja SKPD**

Sebagai media pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda Magetan Tahun 2019 sesuai amanat dalam Program Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan, maka ruang lingkup penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun

dibatasi ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019.

Pola penyusunan yang digunakan untuk dapatnya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Administrasi Perekonomian Setda Magetan dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut :

1. Pertama, mengumpulkan Data Laporan Kinerja sesuai bidang urusan Perekonomian;
2. Kedua, inventarisasi sasaran dengan indikator kinerja yang disesuaikan dengan target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bagian Administrasi Perekonomian Setda Magetan;
3. Ketiga, dari target kinerja yang direncanakan kemudian dicocokkan terhadap realisasi kinerja sesuai dengan indikator yang telah disepakati.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan hasil kinerja suatu organisasi, yang diketahui dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis Organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Administrasi Perekonomian Setda Magetan Tahun 2019 merupakan laporan capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda Magetan Tahun 2018 - 2023.

### **Sistematika**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Administrasi Perekonomian Setda Magetan Tahun Anggaran 2019 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

## **Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)**

### **Bab I. GAMBARAN UMUM**

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya

### **Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja)

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja

### **Bab IV Penutup**

Lampiran-lampiran

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis Bagian Administrasi Perekonomian pada hakekatnya merupakan penjabaran dari visi dan misi yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, khususnya pada pembangunan Perekonomian daerah yang disesuaikan dengan issue – issue strategis di daerah, antara lain permasalahan masih banyaknya masyarakat miskin, jumlah pengangguran yang masih tinggi, dan rendahnya nilai Investasi, maka Perencanaan stratejik dibidang Perekonomian diharapkan dapat menjawab dan menyelesaikan issue – issue stratejik tersebut melalui tersedianya data yang akurat dan valid guna mendukung kebijakan yang akan diputuskan oleh pimpinan daerah.

Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda Magetan.

#### A.1. VISI

Sebagaimana Perencanaan stratejik Pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2018 – 2023 dengan Visi yaitu

**”Masyarakat Magetan yang Smart Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera”**

Dan mengacu salah satu Misinya yaitu :

**” Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Keberpihakan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Basis Sekaligus Ujung Tombak Pembangunan Daerah ”.**

## **Penjelasan Makna.**

Dalam rangka pengembangannya, khususnya potensi alam yang dimiliki oleh Kabupaten Magetan, diperlukan analisa melalui tersedianya data yang valid dan akurat, sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam penetapan kebijakan serta dapat pula digunakan sebagai bahan informasi kepada para pemangku kepentingan (*Shatekholder*) maupun para investor

Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Administrasi Perekonomian, tersedianya data potensi daerah yang valid dan akurat, maka kebijakan Promosi dan Investasi akan lebih terprogram dengan baik dan terarah.

### **A.2 . MISI**

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan dapat diupayakan perwujudannya. Untuk itu disusun tahapan yang terbagi dalam ke dalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya mencapainya.

### **A.3. TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai / diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Tujuan jangka menengah Bagian Administrasi Perekonomian Setda Magetan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengendalian laju inflasi
2. Terwujudnya BUMD yang sehat
3. Meningkatnya perkembangan usaha mikro

#### **A.4. SASARAN**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang ingin dicapai Bagian Administrasi Perekonomian Setda Magetan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pengendalian inflasi daerah
2. Meningkatnya kualitas pembinaan terhadap BUMD
3. Meningkatnya kualitas pengembangan usaha mikro

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Bagian Administrasi Perekonomian adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan	sasaran	Indikator Keberhasilan
1.	Meningkatnya pengendalian inflasi daerah	Meningkatnya kualitas pengendalian inflasi daerah	Presentase kegiatan pengendalian inflasi daerah yang dikoordinasikan
2.	Terwujudnya BUMD yang sehat	Meningkatnya kualitas pembinaan terhadap BUMD	Presentase kegiatan pembinaan BUMD yang dilaksanakan
3.	Meningkatnya perkembangan usaha mikro	Meningkatnya kualitas pengembangan usaha mikro	Presentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha

#### A.5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilandasi kebijakan sebagai berikut :

a. Kebijakan :

1. Melaksanakan koordinasi lintas OPD terkait dalam pengendalian inflasi daerah
2. Meningkatkan koordinasi secara intensif dalam melaksanakan pembinaan BUMD
3. Fasilitasi akses permodalan dalam pengembangan Usaha Mikro

b. Program :

Kebijakan secara operasional dijabarkan ke dalam program-program yang didalamnya mengandung tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan.

Ada 7 program yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Percepatan Pelaksanaan Berusaha
3. Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai Bidang Perekonomian

4. Program Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Daerah
5. Program Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7. Program Fasilitasi Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

### 3.2. Rencana Kinerja Tahun 2019

#### 3.2.1. Komitmen Kinerja

Rencana Kinerja Bagian Administrasi Perekonomian mengemban tanggung jawab urusan penunjang, yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, untuk dapat mencapai sasaran-sasaran yang ingin dicapai tahun 2019. Rencana Kinerja Tahunan 2019 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program Tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Meningkatnya kualitas pengendalian inflasi daerah

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Th 2019	Program dan Kegiatan
1.	Meningkatnya kualitas pengendalian inflasi daerah	Presentase kegiatan pengendalian inflasidaerah yang dikoordinasikan	100%	<p><b>Program :</b> Fasilitasi pengembangan ekonomi daerah</p> <p><b>Kegiatan :</b> Fasilitasi pengendalian inflasi daerah</p>

## 2. Meningkatnya kualitas pembinaan terhadap BUMD

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Th 2019	Program dan Kegiatan
2	Meningkatnya kualitas pembinaan BUMD	Presentase kegiatan pembinaan BUMD yang dilaksanakan	100%	<p><b>Program :</b> Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah</p> <p><b>Kegiatan :</b> Pelatihan manajemen BUMD</p> <p><b>Kegiatan :</b> Monitoring dan evaluasi kinerja BUMD</p> <p><b>Kegiatan :</b> Penyusunan Perda Penyertaan Modal</p> <p><b>Kegiatan :</b> Penyusunan Perda BUMD</p>

## 3. Meningkatnya kualitas pengembangan usaha mikro

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Th 2019	Program dan Kegiatan
3.	Meningkatnya kualitas pengembangan usaha mikro	Presentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha	100%	<p><b>Program :</b> Fasilitasi penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif</p> <p><b>Kegiatan :</b> Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah</p> <p><b>Kegiatan :</b> Fasilitasi pengembangan usaha kecil mikro</p>

				<p><b>Kegiatan :</b> Koordinasi dan pendataan Ekonomi Kreatif</p> <p><b>Kegiatan :</b> Koordinasi dan pendataan Lembaga Keuangan Mikro</p> <p><b>Kegiatan :</b> Penagihan dan evalausi pelaksanaan KEK Intan Pesada</p> <p><b>Kegiatan :</b> Penyusunan Kebijakan pengembangan usaha kecil menengah</p>
--	--	--	--	---

### 3.2.2 Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kerja

Laporan yang akuntabel adalah laporan yang yang ketercapain sasarannya diukur berdasarkan indikator yang memiliki kriteria : *spesifik, dapat dicapai, memiliki relevansi dengan sasaran, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur*. Indikator tersebut telah disepakati oleh setiap stakeholder sebelum proses pelaksanaan program dan kegiatan dijalankan sehingga dapat digunakan sebagai sarana analisis dan evaluasi terhadap kinerja organisasi.

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh organisasi. Indikator kinerja haruslah dipandang sebagai *early warning system* yang secara antisipasif dapat dijadikan alat pengendalian organisasi untuk pengambilan keputusan strategis agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat yang dalam hal ini Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Magetan.

Untuk menilai sejauh mana keberhasilan dan ketidak berhasilan sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>JUMLAH NILAI</b>	<b>KATEGORI</b>
1.	85 sampai dengan 100	Sangat baik
2.	70 s/d kurang dari 85	Baik
3.	55 s/d kurang dari 70	Cukup baik
4.	Kurang dari 55	Kurang

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran terhadap realisasi dibanding target yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidak berhasilan dalam pencapaian sasaran dan atau kegiatan guna meningkatkan kinerja organisasi

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2019 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Bagian Administrasi perekonomian dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2018 – 2023.

Capaian kinerja indikator sasaran Bagian Administrasi Perekonomian merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada tahun 2019, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk presentase (%) sesuai tabel berikut :

##### 1. Meningkatnya kualitas pengendalian inflasi daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian th 2018 (%)	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas pengendalian inflasi daerah	Presentase kegiatan pengendalian inflasi daerah	100	100%	100%	100

## 2. Meningkatnya kualitas pembinaan terhadap BUMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian th 2018	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	Meningkatnya kualitas pembinaan terhadap BUMD	Presentase kegiatan pembinaan BUMD yang dilaksanakan	100	100	100	100

## 3. Meningkatnya kualitas pengembangan usaha mikro

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian th 2018	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
3.	Meningkatnya kualitas pengembangan usaha mikro	Presentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha	74	74	74	100

### A.1. Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala mandat yang diberikan kepada pengemban amanat. Sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab Magetan sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat dari Bagian Administrasi Perekonomian Setda Magetan dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Bagian Adiministrasi Perekonomian Setda Magetan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Kasubbag pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2019, telah dapat dicapai oleh Bagian Administrasi Perekonomian Setda Magetan dengan performance kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Magetan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Tabel Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kategori
Meningkatnya kualitas pengendalian inflasi daerah	Presentase kegiatan pengendalian inflasi daerah	100%	100%	Sangat baik

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut di tetapkan indikator ; Presentase kegiatan pengendalian inflasi daerah

Indikator tersebut untuk mengukur pencapaian sasaran dalam pelaksanaan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, yaitu ; Program Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Daerah dengan Kegiatan ; Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah. Target capaian kinerja sasaran tersebut 100%.

Ketercapaian tersebut didukung oleh adanya ketersediaan anggaran yang cukup dalam melaksanakan program dan kegiatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan rapat-rapat, koordinasi dan upload data harga 28 kebutuhan pokok dalam Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga bahan Pokok (SISKAPERBAPO) yang dilaksanakan setiap hari.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2019 sama dengan capaian kinerja tahun 2018, yang juga tercapai 100%.

b.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kategori
Meningkatnya kualitas pembinaan terhadap BUMD	Presentase kegiatan pembinaan BUMD yang dilaksanakan	100%	100%	Sangat baik

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut di tetapkan indikator ; Presentase kegiatan pembinaan BUMD yang dilaksanakan.

Indikator tersebut untuk mengukur pencapaian sasaran dalam pelaksanaan 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan, yaitu ; Program Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Kegiatan :

1. Kegiatan Pelatihan Manajemen BUMD

Target kinerja sasaran pada kegiatan Pelatihan Manajemen BUMD adalah 18 orang dan tercapai 100%.

Ketercapaian tersebut didukung oleh adanya ketersediaan anggaran yang cukup dalam melaksanakan program dan kegiatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan pelatihan manajemen BUMD yang diikuti oleh Karyawan dan karyawan di lingkup Bagian Administrasi Perekonomian sebagai Pembina BUMD dan juga mengikutsertakan personil dari BUMD yang ada di Kabupaten Magetan yaitu PT. BPRS Magetan dan PDAM Lawu Tirta.

Pada tahun 2019 kegiatan Pelatihan Manajemen BUMD merupakan kegiatan baru.

2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi BUMD

Target kinerja sasaran pada kegiatan Monitoring dan evaluasi BUMD adalah 4 kali dan tercapai 100%.

Ketercapaian tersebut didukung oleh adanya ketersediaan anggaran yang cukup dalam melaksanakan program dan kegiatan. Adapun kegiatan yang

dilaksanakan adalah melaksanakan monitoring pada BUMD yang ada di Kabupaten Magetan yaitu PT. BPRS Magetan dan PDAM Lawu Tirta dan juga melaksanakan evaluasi atas kinerja BUMD.

Pada tahun 2019 kegiatan monitoring dan evaluasi BUMD merupakan kegiatan baru.

3. Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Penyertaan Modal

Target kinerja sasaran pada kegiatan Penyusunan Perda Penyertaan Modal adalah 1 (satu) dokumen Perda dan tercapai 100%.

Ketercapaian tersebut didukung oleh adanya ketersediaan anggaran yang cukup dalam melaksanakan program dan kegiatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah menyusun Perda penyertaan modal pada 1 (satu) BUMD yang ada di Kabupaten Magetan yaitu PDAM Lawu Tirta.

Penyusunan Perda Penyertaan modal perlu disusun karena Perda penyertaan modal pada PDAM Lawu Tirta telah habis pada tahun 2019.

4. Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah BUMD

Target kinerja sasaran pada kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah BUMD adalah 2 (dua) dokumen Perda dan tercapai 100%.

Ketercapaian tersebut didukung oleh adanya ketersediaan anggaran yang cukup dalam melaksanakan program dan kegiatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah menyusun Peraturan Daerah BUMD pada 2 (dua) BUMD yang ada di Kabupaten Magetan yaitu PDAM Lawu Tirta dan PT. BPRS Magetan.

Penyusunan perubahan Perda ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah bahwa BUMD berbentuk Perumda dan Perseroda.

c.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kategori
Meningkatnya kualitas pengembangan usaha mikro	Presentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha	74 %	74%	baik

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator ; Presentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha.

Indikator tersebut untuk mengukur pencapaian sasaran dalam pelaksanaan 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan, yaitu :

1. Program Fasilitasi penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif.

Kegiatan :

- Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah, dengan target kegiatan 4 (empat) kali rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi. Target capaian kinerja sasaran tersebut 100%.

Ketercapaian tersebut didukung oleh adanya ketersediaan anggaran yang cukup dalam melaksanakan program dan kegiatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan rapat-rapat, koordinasi dan upload data calon penerima KUR di Sistem Informasi Kredit Program ( SIKP ). Dalam Upload data KUR ini masih terkendala dengan data-data yang kurang lengkap dari OPD terkait yang mempunyai kelompok-kelompok binaan.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2019 sama dengan capaian kinerja tahun 2018, yang juga tercapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan koordinasi rapat-rapat dan konsultasi yang direncanakan semua dapat terlaksana.

- Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Mikro  
Kegiatan Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Mikro, dengan target kegiatan 4 (empat) kali rapat koordinasi, monitoring dan

evaluasi. Adapun target capaian kinerja sasaran tersebut baru tercapai 50%.

Ketidaktercapaian target tersebut dikarenakan belum adanya koordinasi yang baik antar stakeholder terkait. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan rapat koordinasi, rapat sosialisasi Sertifikasi Hal Atas Tanah ( SHAT ) yang merupakan program lintas sektor.

- Kegiatan Penagihan dan Evaluasi Pelaksanaan KEK Intan Pesada dengan target Rp. 50.000.000,- . adapun target yang masuk adalah Rp. 189.325.690,- atau naik sebesar 378,70% jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Tercapainya target tersebut dikarenakan : frekuensi penagihan yang relative sering, koordinasi yang baik antar OPD, semakin meningkatnya kesadaran nasabah untuk membayar utang, adapun ada beberapa kendala yang dihadapi seperti nasabah yang sudah tidak aktif kegiatan usahanya, nasabah pindah tempat dan alamat tidak jelas dan terdapat beberapa anggota meninggal dunia. Kegiatan yang dilaksanakan adalah penagihan kepada 48 (empat puluh delapan) nasabah dan adanya pengurangan tunggakan sebesar Rp. 189.325.690,00.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2019 lebih tinggi dari capaian kinerja tahun 2018 yang tercapai 378,70%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 tunggakan yang bisa tertagih sebesar Rp. 189.325.690,00 sedangkan untuk tahun 2018 tunggakan yang tertagih sebesar Rp. 22.980.002,00

- Kegiatan Koordinasi dan Pendataan Ekonomi Kreatif dengan target kegiatan penyusunan 1 (satu) dokumen pendataan Ekonomi Kreatif. Target capaian kinerja sasaran tersebut 100%. Ketercapaian tersebut didukung oleh adanya ketersediaan anggaran yang cukup dalam melaksanakan program dan kegiatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan rapat-

rapat, koordinasi dan pendataan usaha ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Magetan yang bekerjasama dengan pihak akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Kegiatan Koordinasi dan Pendataan Ekonomi Kreatif pada tahun 2019 merupakan kegiatan baru di Bagian Administrasi Perekonomian.

- Kegiatan Pendataan dan Pendataan Lembaga Keuangan Mikro dengan target kegiatan penyusunan 1 (satu) dokumen pendataan Lembaga Keuangan Mikro. Target capaian kinerja sasaran tersebut 100%.

Ketercapaian tersebut didukung oleh adanya ketersediaan anggaran yang cukup dalam melaksanakan program dan kegiatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan rapat-rapat, koordinasi dan pendataan Lembaga Keuangan Mikro yang ada di Kabupaten Magetan bekerjasama dengan pihak akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Kegiatan Koordinasi dan Pendataan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2019 merupakan kegiatan baru di Bagian Administrasi Perekonomian.

- Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengembangan Usaha Kecil Menengah.

dengan target kegiatan penyusunan 1 (satu) dokumen Perda Pengelolaan dana Bergulir. Target capaian kinerja sasaran tersebut 100%.

Ketercapaian tersebut didukung oleh adanya ketersediaan anggaran yang cukup dalam melaksanakan program dan kegiatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan Penyusunan Peraturan Daerah tentang pengelolaan dana Bergulir di Kabupaten Magetan bekerjasama dengan pihak akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Suarakarta.

## 2. Program Percepatan Pelaksanaan Berusaha

- Kegiatan Rapat koordinasi dan monitoring evaluasi pelayanan perizinan

dengan target kegiatan 4 (empat) kali, sedangkan target yang dicapai sasaran 50%.

Ketidaktercapaian target karena belum adanya koordinasi yang baik antar stakeholder walaupun didukung oleh adanya ketersediaan anggaran yang cukup dalam melaksanakan program dan kegiatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan rapat dan koordinasi untuk pendataan permasalahan-permasalahan terkait dengan pelaksanaan perijinan di Kabupaten Magetan.

## 3. Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai Bidang Perekonomian

- Kegiatan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, dengan target kegiatan 4 (empat) kali

dengan target capaian kinerja sasaran tersebut 100%.

Ketercapaian tersebut didukung oleh adanya ketersediaan anggaran yang cukup dalam melaksanakan program dan kegiatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap OPD pengelola DBHCHT di Kabupaten Magetan sesuai dengan tugas Bagian Administrasi sebagai Sekretariat DBHCHT Kabupaten Magetan.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2019 sama dengan capaian kinerja tahun 2018, yang juga tercapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya semua kegiatan yang direncanakan semua dapat terlaksana.

Keberhasilan ini disebabkan karena telah tercapainya pelaksanaan sesuai dengan rencana. Untuk meningkatkan pelaksanaan di masa yang akan datang perlu lebih dimatangkan dalam perencanaan.

- Kegiatan Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan /atau pemangku

kepentingan, dengan target kegiatan 300 orang, target capaian kinerja sasaran tersebut 100%.

Ketercapaian tersebut didukung oleh adanya ketersediaan anggaran yang cukup dalam melaksanakan program dan kegiatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Sosialisasi tatap muka 2 kali, dialog interaktif 1 kali, kalender 1000 buah, kaos 150 buah, tas 65 buah, mug 500 buah, Jaket 300 buah, cetak spanduk stop rokok illegal 100 buah dan spot iklan berupa cetak, elektronik dan Web selama 11 bulan yaitu iklan media cetak di 10 (sepuluh) media cetak, 3 media televisi dan 2 radio.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2019 sama dengan capaian kinerja tahun 2018, yang juga tercapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya semua kegiatan yang direncanakan semua dapat terlaksana.

Keberhasilan ini disebabkan karena telah tercapainya pelaksanaan sesuai dengan rencana. Untuk meningkatkan pelaksanaan di masa yang akan datang perlu lebih dimatangkan dalam perencanaan.

#### 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

##### ➤ Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran

Dengan target kegiatan 12 (dua belas) bulan, target capaian kinerja sasaran tersebut 100%.

Ketercapaian tersebut didukung oleh adanya ketersediaan anggaran yang cukup dalam melaksanakan program dan kegiatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi dibidang perekonomian, penyediaan ATK serta Makan minum rapat.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2019 sama dengan capaian kinerja tahun 2018, yang juga tercapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan koordinasi rapat-rapat dan konsultasi yang direncanakan semua dapat terlaksana.

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

➤ Kegiatan Pengadaan perlengkapan kantor

Dengan target kegiatan 4 (empat) unit terdiri dari 2(dua) komputer dan 2 (dua) printer, target capaian kinerja sasaran tersebut 100%.

Ketercapaian tersebut didukung oleh adanya ketersediaan anggaran yang cukup dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan 2 komputer dan 2 printer sebagai penunjang sarana peningkatan kinerja di Bagian Administrasi perekonomian.

**A.2. Akuntabilitas Kinerja Keuangan**

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Administrasi Perekonomian, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Administrasi Perekonomian Tahun Anggaran 2019.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi Anggaran, yang ditampilkan dalam presentase realisasi. Pada tahun 2019, anggaran Bagian Administrasi Perekonomian sebesar Rp. 2.332.156.645,00 yang direalisasikan sebesar Rp. 2.081.731.915,00 atau 89,26 %. Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran	Program	Target (Rp.)	Realisasi	
			Rp.	%
Meningkatnya kualitas pengendalian inflasi daerah	Program : Fasilitasi pengembangan ekonomi daerah	170.000.000	167.080.073	99,45
Meningkatnya kualitas pembinaan terhadap BUMD	Program : Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	390.000.000	369.073.982	94,63

Meningkatnya kualitas pengembangan usaha mikro	Program : Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	296.000.000	238.465.121	80,56
	Program : Percepatan Pelaksanaan Berusaha	50.000.000	41.300.202	82,60
	Program : Sosialisasi ketentuan di bidang cukai bidang perekonomian	1.232.156.645	1.075.526.008	87,28

Realisasi sebesar 89,26 % atau dibawah anggaran yang disediakan mencerminkan adanya efisiensi penggunaan anggaran oleh Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Magetan.

### A.3. Capaian Kinerja Akhir Periode RPJMD / RENSTRA

Capaian realisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian sampai dengan akhir periode RPJMD / RENSTRA tahun 2018-2023 ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel. Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan akhir Periode RPJMD/RENSRA

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kualitas pengendalian inflasi daerah	Presentase kegiatan pengendalian inflasi daerah	100%	100	100

Meningkatnya kualitas pembinaan terhadap BUMD	Presentase kegiatan pembinaan BUMD yang dilaksanakan	100%	100	100
Meningkatnya kualitas pengembangan usaha mikro	Presentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha	80%	74	74

## BAB IV PENUTUP

Secara umum Bagian Administrasi Perekonomian pada Tahun 2019 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Sub Bagian dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Bagian Administrasi Perekonomian pada tahun 2019 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2018 – 2023, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2019 terdiri dari 3 ( tiga ) sasaran. Secara umum, pencapaian 3 ( tiga ) sasaran dicapai oleh Bagian Administrasi Perekonomian dengan kategori sangat baik.

Sedangkan capaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 3 (tiga) sasaran, yang didukung oleh 15 (lima belas) kegiatan. Kinerja keuangan dari sasaran tersebut, menunjukkan hasil capaian bahwa realisasi keuangan di Bagian Administrasi Perekonomian dengan 15 ( lima belas ) kegiatan diatas 89,26% dari rencana anggaran.

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab Magetan. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap *stakeholders* untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bergerak pada bidang Perekonomian di Kabupaten Magetan, Organisasi Perangkat Daerah yang bergerak pada bidang perekonomian Pemerintah Pusat dan Propinsi, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta (UKM) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang Perekonomian.

2. Dilihat dari akuntabilitas kinerja yang didalamnya tercantum capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan Bagian Administrasi Perekonomian untuk pencapaian kinerja sasaran tahun 2019 mencapai keberhasilan. Walaupun ada beberapa sasaran yang tidak mencapai target yang dikarenakan kurangnya koordinasi yang baik dan perencanaan yang kurang matang. Untuk kedepannya akan diantisipasi dengan koordinasi yang lebih baik, perencanaan yang lebih matang, terorganisir dan akurat.
  
3. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan dibidang perekonomian berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.

